

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Seknas Fitra – Mendorong Keterbukaan Rencana dan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Sulawesi Selatan

Senin, 20 September 2022 – Pukul: 13.00 – 15.00

PENDAHULUAN

Open Government Indonesia telah membuka periode usulan rencana aksi untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat mengusulkan rencana aksi mereka dalam lingkup keterbukaan pemerintah. Seknas Fitra sebagai salah satu OMS mengusulkan rencana aksi dengan judul “Mendorong Keterbukaan Rencana dan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Sulawesi Selatan”. Sasaran di dalam proposal usulan rencana aksi mencakup beberapa poin ukuran keberhasilan dalam lingkup keterbukaan untuk mempublikasi dokumen perencanaan dan anggaran beserta mendorong efektivitas kanal informasi.

TUJUAN

Rapat pendalaman usulan ini bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan paparan usulan rencana aksi yang diusulkan oleh Seknas Fitra dalam lingkup Keterbukaan Rencana dan Anggaran;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait.

PEMBAHASAN

1. **Armita** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011, untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
 - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitas pencapaian RAN OGI lewat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - Telah terdapat 6 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) sejak tahun 2011 – 2022 saat ini dimana setiap periode RAN tersebut memiliki berbagai macam bentuk fokus isu dengan banyak poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis yakni: 1) anti korupsi dan anggaran; 2) ruang kewargaan dan demokrasi; 3) pelayanan publik yang inklusif; 4) akses keadilan; 5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); 6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
 - Di dalam usulan rencana aksi ini ada delapan ukuran keberhasilan dengan K/L sasaran yang menjadi penanggung jawab antara lain LKPP, Kemendagri, Kemenkumham, dan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi;
2. **Bapak Ervyn Kaffah** selaku Manajer Advokasi dari Setnas Fitra menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Ide usulan secara sederhana mencakup lingkup *open data* untuk dapat transparansi dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Piloting di Sulawesi Selatan untuk adanya integrasi dokumen anggaran dimana ada satu platform yang dikelola pemerintah provinsi yang berisikan informasi dokumen anggaran pemerintah Sulsel dan beberapa kabupaten/kota;
 - Harapannya akan ada ko-kreasi dengan Kemendagri, Pemerintah Provinsi

Sulsel, dan satu atau dua kabupaten yang dapat diajak bergabung untuk pelaksanaan piloting inisiatif usulan rencana aksi;

3. **Ibu Rosmiati Azis** selaku Direktur YASMIB Sulawesi dan Dewan Nasional Setnas Fitra menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Kondisi di Sulsel terkait keterbukaan informasi dokumen penganggaran yakni di tahun 2011 sudah terbentuk Komisi Informasi Provinsi Sulsel dan instansi ini sedang gencarnya mendorong keterbukaan informasi di tingkat kabupaten maupun kota;
- Masih ada pengeluaran biaya untuk mengakses informasi publik semisal untuk memfotocopy dokumen yang seharusnya bisa dipublikasi secara online;
- Peran KIProvinsi Sulsel terlihat mendorong hal ini dengan adanya evaluasi keterbukaan informasi, selain itu sedang ada pembenahan PPID utama di bawah Kemenkominfo;
- Pelaksanaan lapangan belum memberikan progres maksimal yang diharapkan oleh publik, dimana keterbukaan anggaran bukan hanya sebatas transparansi APBD tetapi juga sampai ke level DPA;
- Perki keterbukaan informasi dan permintaan dokumen PBJ menunjukkan kondisi dimana hampir semua kabupaten/kota belum siap mempublikasi dokumen-dokumen tersebut kepada publik;
- Strategi yang ditawarkan mencakup beberapa tahap antara lain mengadakan lokakarya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan bagaimana tantangan dan peluang di Sulsel, melakukan FGD untuk mendesain platform yang akan digagas kemudian dilanjut dengan proses penyusunan dan launching, dan meningkatkan kesadaran publik atas keterbukaan informasi di Provinsi Sulsel;
- Sudah ada peraturan lembaga terkait PBJ darurat tetapi informasinya masih sangat minim, maka usulan review perlem darurat diusulkan untuk dilakukan

4. **Ibu Kiki** selaku perwakilan dari Dit. Pembangunan Daerah Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Dit. PD mengawal renja yang disusun oleh Kemendagri dimana dalam konteks keterbukaan anggaran ada di bawah koordinasi Ditjen Keuangan Daerah;
- Integrasi perencanaan dan penganggaran berbeda dengan konteks keterbukaan informasi publik, keterbukaan penganggaran sudah didorong antara Dit. PD dan Ditjen Keuda dengan adanya penetapan Perda APBD yang bisa diakses publik. UU APBN maupun Perpes UU APBN terbuka untuk publik hal ini yang ingin didorong untuk dapat dilaksanakan Pemda dalam lingkup APBD. Apa hal yang ingin disasar terlebih dahulu dan sejauh mana keterbukaan publik yang ingin disasar;
- Akses publik hanya sampai di tingkat APBD, apabila sampai DPA itu sudah sampai komponen-komponen belanja yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Dapat dilakukan diskusi dengan Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang mengampu kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Dit ini memiliki data PPID provinsi yang memenuhi persyaratan, berapa APBD dan kebaruannya yang bisa diakses, hal ini bisa dilakukan untuk memperkuat justifikasi mengapa menyasar Sulsel;
- Hal penting yang dapat ditambahkan di dalam usulan program: bagaimana mekanisme feedback dari masyarakat atau pelaku usaha yang mendapatkan data informasi keterbukaan anggaran tersebut;

5. **Ibu Prima Sari** selaku perwakilan dari Dit. Pembangunan Daerah Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Kondisi *existing* saat ini informasi APBD sudah dapat diakses di website SIKD yang dimiliki oleh DJPK Kemenkeu yang memang tingkat kedalamannya hanya sampai menyajikan belanja perfungsi belum sampai DPA dinas;
- Dit. PD belum mendalami hal terkait mengapa DPA belum sampai terpublikasi

secara publik hal ini perlu klarifikasi lebih lanjut, dapat juga didorong dari sisi realisasi bukan hanya perencanaan dimana nantinya publik dapat memantau dari perencanaan sampai nantinya realisasi;

6. **Ibu Defira** selaku perwakilan dari Dit. Pembangunan Daerah Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Perlu pembuatan framework dari dasar intervensi sampai dengan output/outcome yang diharapkan ditambah dengan program yang dapat mendukung output/outcome yang diharapkan, apabila nantinya transparansi telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat maka setelah program intervensi ini perlu dielaborasi lebih lanjut *impactnya* seperti apa;

7. **Sesi diskusi** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus terbuka dapat mengacu kepada Perkislip 1/2021, dokumen APBD, DPA, RKA, sampai dengan realisasi anggaran merupakan bagian indikator yang menjadi pertanyaan terkait keterbukaan informasi publik. Dokumen DPA seharusnya bukan menjadi dokumen rahasia, harus ada rasionalisasi untuk hal tersebut maka harus dilihat lebih lanjut mana dokumen yang boleh dibuka untuk publik ataupun tidak;
- Akan dilakukan pemetaan dan pembuatan framework terkait dasar intervensi sampai dengan output dan outcome yang hendak dicapai;
- Perlu ada kesepakatan format dokumen apa saja yang harus ditampilkan, menurut Setnas Fitra Dokumen lampiran I – lampiran V merupakan dokumen yang harus terbuka untuk publik tetapi memang harus ada diskusi lebih lanjut dengan pihak Kemendagri dan stakeholders di daerah;
- Setnas Fitra berperan mendorong inisiasi agar dapat diimplementasi Kementerian dan Pemda sementara pelaksanaannya adalah K/L, contohnya mendorong platform yang menginfokan anggaran provinsi kabupaten/kota yang kemudian disosialisasikan kepada publik. Perlu ada program di K/L dan dorongan dari pemerintah daerah terkait agar program transparansi anggaran dapat terealisasi dengan baik;
- Dokumen penganggaran harus dibuka agar pemerintah bisa mereview kebijakannya dan tingkat efektivitas penggunaan anggaran, partisipasi dapat dilakukan melalui hal ini. Apabila hanya dokumen ringkasan maka data tersebut hanya bisa dipakai untuk analisis yang tidak mendalam misal untuk memotret berapa persen penggunaan di bidang tertentu dilakukan
- Dibukanya lampiran 1 dan lampiran 2 hanya memenuhi syarat transparansi aja, misalnya penganggaran untuk kelompok disabilitas untuk 1 tahun apa saja programnya dan siapa saja target groupnya
- Sebaiknya transparansi tidak hanya disasar dari proses penganggaran tetapi juga perencanaan hingga pertanggungjawaban;
- Usulan proposal perlu dipertajam apa keterlibatan K/L siapa stakeholders yang menjadi leadnya dan agar strateginya jelas maka dipisahkan menjadi 2 (fokus penganggaran dan eksekusi pelaksanaan di PBJ) karena merupakan 2 hal berbeda yg pendekatannya berbeda (perda apbd dan perda pertanggungjawaban apbd itu ada di direktorat yang berbeda di kemendagri, karena RO atau outputnya jg akan berbeda

KESIMPULAN

Usulan rencana aksi mengenai keterbukaan rencana dan penganggaran untuk dokumen APBD memiliki rencana kerja di Kemendagri dan Dit. Pembangunan Daerah mengawal renja terkait keterbukaan anggaran yang berada di bawah koordinasi Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Akan tetapi, perlu penajaman, pemetaan, dan diskusi lebih lanjut terkait sasaran kegiatan yang akan dicapai apakah mengenai perencanaan dan anggaran APBD harus lebih

transparan ke level DPA, apakah untuk mendorong keterbukaan informasi publik, apakah di tingkat evaluasi penggunaan APBD semuanya harus dipertajam dan dibuatkan kerangkanya dari mulai dasar intervensi hingga output yang hendak dicapai.

DOKUMENTASI

